

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses berkesinambungan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Manusia bukan hanya merupakan objek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subjek sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah atau daerah yang secara makro menjadi kemajuan suatu negara (Hauzan et al., 2021)

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dari setiap daerah, termasuk Provinsi Jawa Timur. Indeks pembangunan manusia menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Berbagai faktor dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, pengangguran dan kemiskinan. Sumber daya manusia sebagai satu diantara elemen pokok dalam pembangunan ekonomi suatu negara, dimana pembangunan tersebut dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kesejahteraan negara, dengan pentingnya faktor skala ekonomidan kualitas Sumber Daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut (Ningrum et al., 2020)

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dengan menduduki peringkat 14 secara nasional dari 38 provinsi di Indonesia. Di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa, IPM Jawa Timur menempati peringkat ke-5, berada di bawah DKI Jakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, bahkan menjadi salah satu penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa. Namun demikian, kemajuan ekonomi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kualitas hidup masyarakat dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, memang menunjukkan tren peningkatan, namun masih terdapat kesenjangan yang mencolok antar daerah. Kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Kediri memiliki IPM tinggi dan cenderung terus meningkat, sementara wilayah-wilayah seperti Sampang, Bondowoso, dan Bangkalan masih berada pada kategori IPM rendah. Selain itu, angka pengangguran terbuka di Jawa Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, khususnya di kalangan usia produktif dan lulusan pendidikan menengah serta tinggi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kemiskinan juga masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, di mana akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih terbatas. Padahal, kemiskinan yang tinggi dan pengangguran yang meluas dapat menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian pembangunan manusia.

Di sisi lain, meskipun rata-rata lama sekolah meningkat secara bertahap, beberapa daerah masih memiliki angka harapan sekolah yang rendah, yang menunjukkan bahwa anak-anak di wilayah tersebut belum sepenuhnya mendapatkan akses pendidikan yang layak. Fenomena-fenomena tersebut

mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Jawa Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial secara simultan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara empiris bagaimana pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan memengaruhi IPM di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.

Model pembangunan yang dikembangkan saat ini salah satunya pembangunan manusia, yang diamati berdasarkan kualitas hidup manusia di suatu negara yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipakai untuk parameter pengukuran keberhasilan kualitas hidup manusia. Tahun 1990 *United Nations Development Programme* (UNDP) mempublikasikan IPM yang diterbitkan dilaporan *Human Development Report* (HDR). Kualitas pendidikan, kesehatan dan tingkat ekonomi dipakai sebagai tolok ukur kualitas hidup manusia. Konsep IPM diperkenalkan pertama kali oleh program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa (UNDP) melalui laporan pembangunan manusia pada tahun 1990. Dalam tulisan tersebut, perkembangan manusia disebut sebagai “*A Process Of Enlarging People Choices*” atau langkah langkah untuk memperluas pilihan untuk masyarakat. Terdapat tiga dimensi utama yang termasuk dalam laporan UNDP “*Human Development Report 1990*” yaitu *Longevity and Healty Life* (umur yang panjang dan sehat), *Knowledge* (Pengetahuan) dan *Decent Standart Of Living* (standar hidup yang layak).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah menjadi indikator kunci dalam menilai keberhasilan pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

hidup manusia. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mencapai peningkatan IPM. Salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup berbagai upaya seperti peningkatan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatasi masalah kemiskinan dengan program-program yang bertujuan untuk mengangkat tingkat kesejahteraan mereka yang kurang beruntung.

IPM dapat diartikan bagaimana masyarakat mendapatkan hasil pembangunan baik dari segi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dll. Secara nasional, angka IPM trendnya selalu meningkat. Dapat disebabkan meningkatnya kualitas sistem pendidikan dan kesehatan terus menaikkan pembangunan SDM yang menjadi pengaruh angka IPM Indonesia (BPS, 2020). IPM menggunakan tiga dimensi utama, yakni pengeluaran, kesehatan, dan pendidikan.

Adapun dasar teori yang mendukung IPM sebagai variabel Y antara lain:

(Human Development Theory) Amartya Sen merumuskan definisi baru pembangunan sebagai kebebasan (*development as Freedom*) Melalui konsep ini Amartya Sen memandang bahwa pembangunan sejatinya bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi semata, tetapi tentang perluasan kebebasan dan kapabilitas manusia. Dengan pandangan ini, ia mendorong agar pembangunan tidak serta merta hanya melihat dimensi kesejahteraan saja, tetapi juga kebebasan manusia untuk berpendapat, berpolitik dan berserikat.

(Capital Theory) dari Gray Backer menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengalaman meningkatkan produktivitas dan pendapatan seseorang. Dengan kata lain, pengetahuan, keterampilan, dan

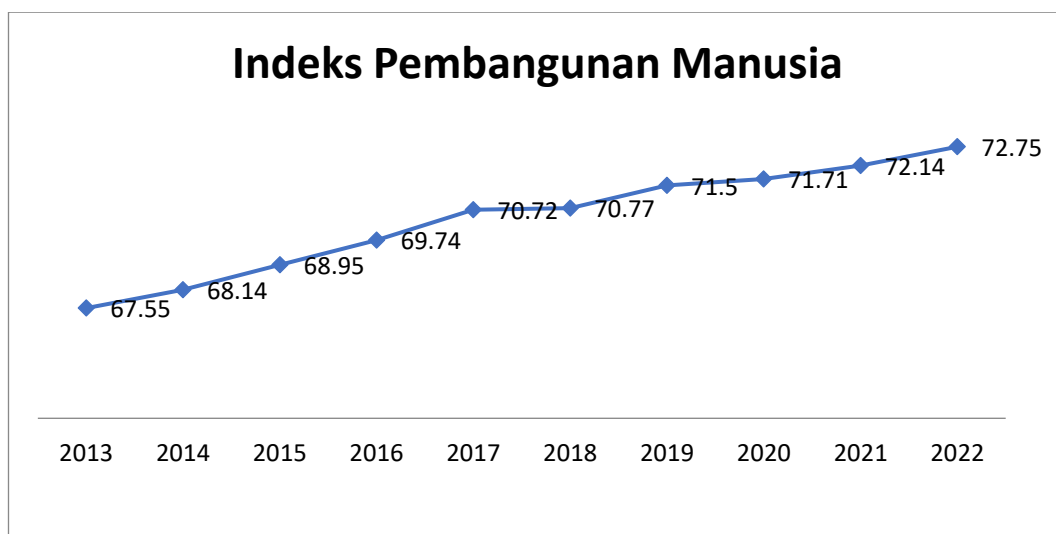
kemampuan (modal manusia) yang dimiliki individu dapat dianggap sebagai modal yang menghasilkan keuntungan ekonomi.

(Capability Approach) dari Amartya Sen adalah kerangka kerja untuk menilai kesejahteraan dan keadilan sosial yang berfokus pada apa yang mampu dilakukan dan dicapai orang, bukan hanya pada pendapatan atau sumber daya mereka. Ini menekankan pentingnya kemampuan individu, yang merupakan peluang nyata yang dimiliki orang untuk mencapai "makhluk dan perbuatan" (fungsi) yang bernilai. Pendekatan ini kontras dengan ekonomi kesejahteraan tradisional, yang sering berfokus pada utilitas atau distribusi sumber daya.

Melalui data yang telah dihimpun dalam (SUPAS) Survei Penduduk Antar Sensus Tahun 2015, Jumlah penduduk Jawa Timur menjadi satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terbanyak. Di tahun 2015, Jawa Timur memiliki populasi sebesar 38 juta jiwa. Dalam periode waktu yang berlangsung hingga tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa, mencapai total 41 juta jiwa. Hal ini mencerminkan pertumbuhan populasi yang signifikan di provinsi tersebut selama beberapa tahun terakhir. Mengacu melalui klasifikasi yang ditetapkan UNDP, pembangunan manusia dikelompokkan dalam 4 kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah. Dengan klasifikasi Sangat tinggi dengan skor diatas 80, Tinggi dengan skor 70-80, Sedang dengan skor 60-70 dan Rendah dengan skor dibawah 60.

Berdasarkan kategori yang telah diberikan oleh UNDP dapat disimpulkan Pembangunan Manusia yang terdapat di Provinsi Jawa Timur pada Periode 2013 hingga 2016 termasuk dalam kategori Sedang, dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga 2022 menjadi kategori Tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa

Timur yang terbit melalui berita resmi, pada satu dekade pembangunan manusia di Jawa Timur mengalami kemajuan lebih lanjut selama satu dekade.



Gambar 1.1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2013-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa IPM pada Provinsi Jawa Timur Mengalami kenaikan yang signifikan, naik dari 67,55 ditahun 2013 menjadi 72,75 ditahun 2022.

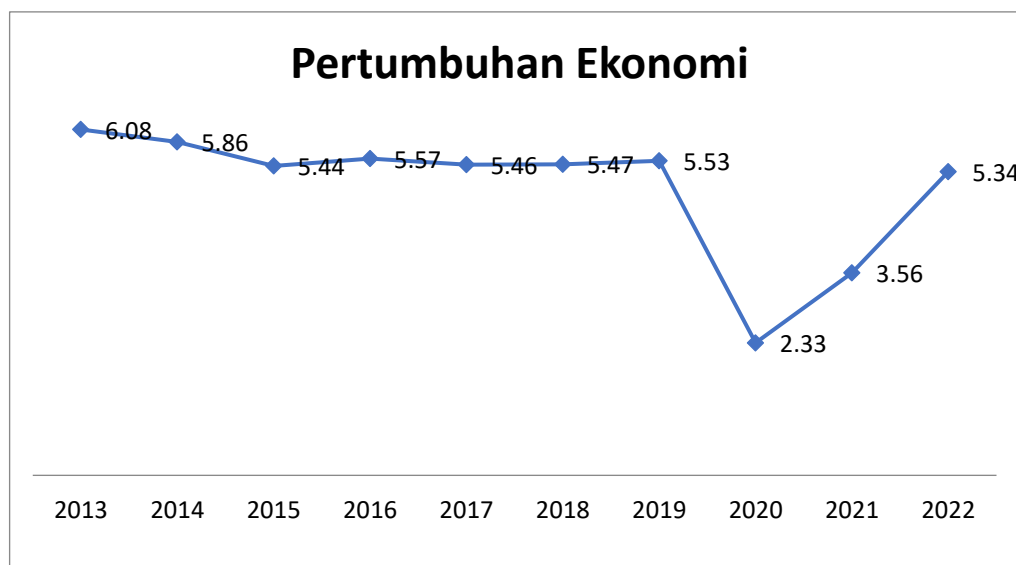
Dalam kurun waktu tersebut IPM Jawa Timur berkembang dengan sekitar 0,90 persen per tahun dan telah mencapai tingkat "tinggi" sejak tahun 2017. Meskipun demikian, pandemi COVID-19 tampaknya tidak memberikan dampak signifikan pada pencapaian pembangunan manusia di Jawa Timur. Pada tahun 2021, IPM mencapai 72,14, tumbuh sebesar 0,60 persen, mengungguli pertumbuhan tahun sebelumnya.

Adapun pada tahun 2022, IPM Jawa Timur mencapai 72,75, menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,85 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Selama kurun waktu 2011-2022, laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa

Timur mengalami empat kali perlambatan, yaitu di tahun 2014 (pertumbuhannya melambat menjadi 0,87%), Tahun 2017 (pertumbuhannya melambat menjadi 0,76 persen), Tahun 2018 (pertumbuhannya melambat menjadi 0,71 persen) dan Tahun 2020 (pertumbuhannya melambat menjadi 0,30 persen).

Jawa Timur menempati peringkat ke-4 secara nasional dalam pertumbuhan IPM selama lima tahun terakhir, dengan kenaikan sebesar 3,85 poin bersama provinsi Riau dengan kenaikan. Sebesar 4,41 poin, Sumatera Barat dengan kenaikan 4,04 poin, dan Sumatera Utara kenaikan 4,02 poin. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Jawa Timur menempati peringkat terbawah di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun di tahun 2020, sebagian besar dipicu oleh penurunan pertumbuhan komponen pengeluaran per kapita/tahun yang disesuaikan, komponen lainnya tetap mengalami pertumbuhan positif. Setelah intensitas pandemi COVID-19 berangsur-angsur menurun, terutama pada tahun 2022, aktivitas ekonomi mulai pulih, sehingga mendorong peningkatan IPM pada tahun 2021. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi tingkat Pengangguran dan kemiskinan dengan memperbaiki kondisi pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu upaya yang efektif (Elinda Rahmah & Murgianto, 2016)



Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2013-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 1.2 Pada dasarnya, fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam kurun waktu 2013-2022 di Provinsi Jawa Timur mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks. Dalam konteks yang telah disebutkan, dampak perlambatan ekonomi pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab signifikan dari fluktuasi tersebut. Ketenagakerjaan berupa pengangguran adalah salah satu masalah utama yang sering dihadapi negara.

Pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi berada di angka 6,08%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 menjadi 5,86%. Tren penurunan ini terus berlanjut hingga 2016, di mana angka pertumbuhan mencapai 5,46%. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi relatif stabil pada kisaran 5,47% hingga 5,53% pada tahun 2019.

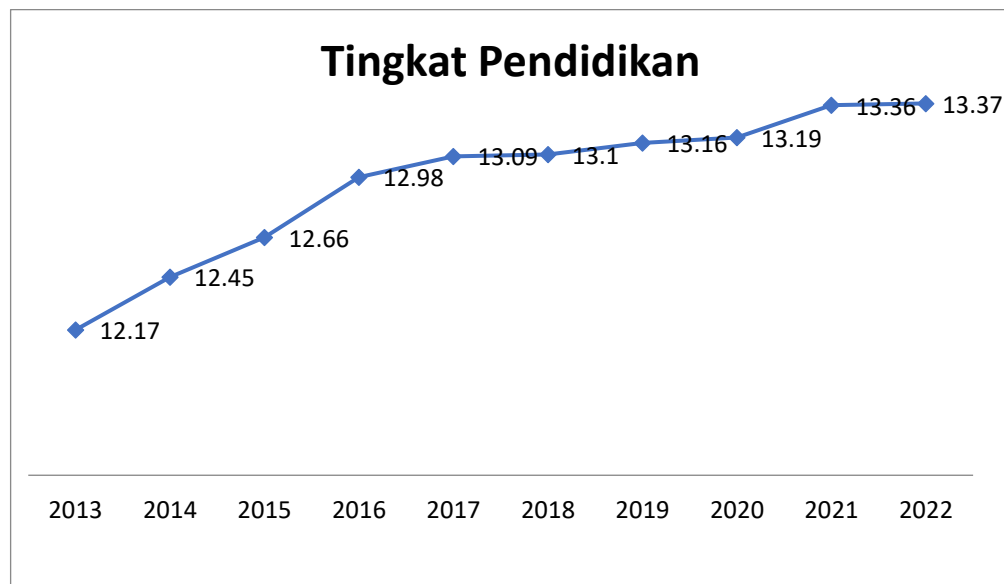
Namun, pada tahun 2020 terjadi perlambatan ekonomi yang sangat signifikan akibat dampak pandemi COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi anjlok drastis

ke angka 2,33%. Ini mencerminkan dampak besar pandemi terhadap berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, dan ketenagakerjaan.

Setelah mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020, ekonomi mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,56%. Pemulihan ini semakin menguat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,34%, mendekati angka sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mulai kembali normal, didorong oleh berbagai kebijakan pemulihan ekonomi serta peningkatan kembali konsumsi dan investasi di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saat ini menempati peringkat kedua di Pulau Jawa, setelah DKI Jakarta. Kontribusi Jawa Timur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga cukup signifikan, yaitu sekitar 14,44%.

Dengan melihat pola pertumbuhan ini, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Jawa Timur menunjukkan ketahanan dalam menghadapi krisis dan memiliki prospek pemulihan yang baik setelah menghadapi tantangan besar akibat pandemi.



Gambar 1.3 Grafik Tingkat Pendidikan Jawa Timur 2013-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

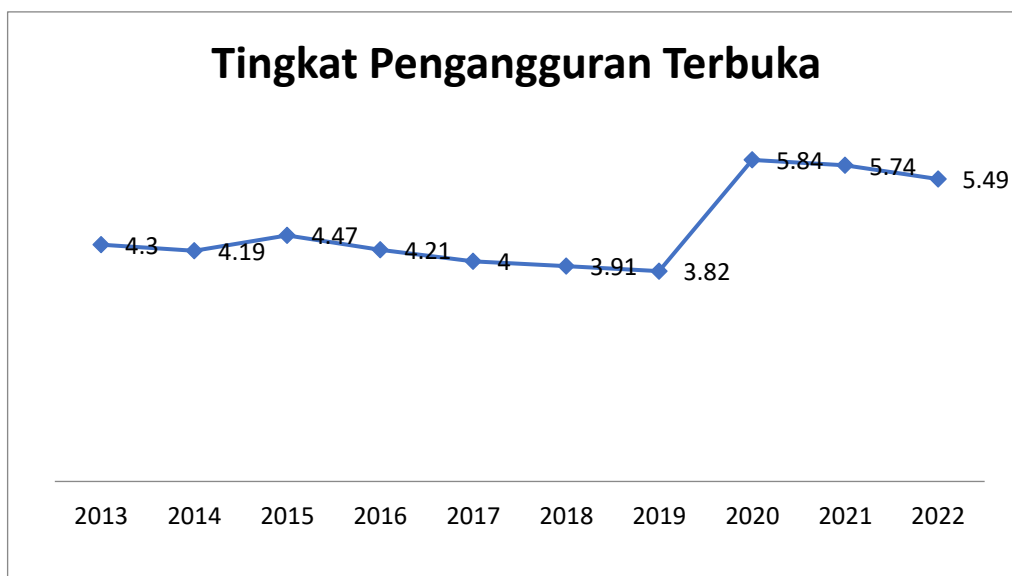
Berdasarkan gambar 1.3 grafik tingkat pendidikan yang diatas, dapat dijelaskan bahwa perkembangan tingkat pendidikan di wilayah yang diteliti menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2013 hingga 2022.

Pada tahun 2013, tingkat pendidikan berada di angka 12,17 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2014 naik menjadi 12,45, kemudian pada 2015 mencapai 12,66, dan pada 2016 meningkat lagi menjadi 12,98. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor pendidikan, baik dari segi akses, kualitas, maupun partisipasi pendidikan. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, di mana tingkat pendidikan pada 2017 mencapai 13,09, lalu pada 2018 mencapai 13,1. Kemudian, pada 2019 meningkat menjadi 13,16 dan terus naik ke angka 13,19 pada 2020 dan 2021 meningkat menjadi 13,36. Pada tahun 2022, tingkat pendidikan mencapai angka 13,37, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam periode tersebut.

Peningkatan tingkat pendidikan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar, program bantuan pendidikan, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021 yang berdampak besar terhadap sistem pendidikan, tingkat pendidikan tetap menunjukkan tren positif. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya kemajuan yang berkelanjutan dalam bidang pendidikan, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Hal ini menjadi indikator penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial jangka panjang.

Masalah pengangguran merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara maju dan berkembang. Pengangguran dapat memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah penduduk yang besar dan mayoritas berada dalam usia produktif, memiliki potensi besar untuk menjadi sumber daya manusia yang produktif. Pemerintah memang perlu aktif terlibat dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Yang mana hal tersebut penting untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang komprehensif serta memastikan implementasinya dilakukan secara berkelanjutan. Melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, merupakan kunci untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdampak terhadap pembangunan manusia yang maksimal.

Pada Tahun 2019 Berdasarkan BPS, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur mencapai 39,74 juta jiwa, dan terdapat peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,02% pada tahun 2020. Meskipun tingkat pengangguran meningkat pada tahun 2020, angka tersebut turun pada tahun lalu. Menurut Kaufman dan Hotchkiss, Tingkat pengangguran adalah indikator efisiensi perekonomian. Ketika terjadi pengangguran, sebagian dari input tenaga kerja yang tersedia tidak terpakai, sehingga mengakibatkan hilangnya *output*. Di bawah ini adalah grafik tingkat pengangguran di provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 hingga tahun 2022.



Gambar 1.4 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur 2013-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

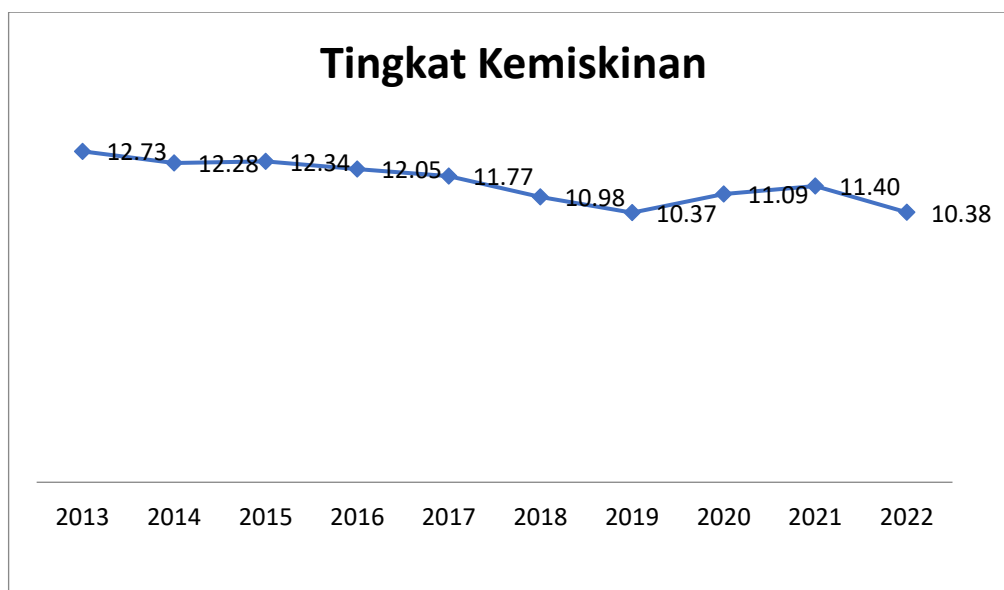
Berdasarkan gambar 1.4 diatas ditunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur berfluktuasi setiap tahunnya. Meskipun terjadi fluktuasi atau tidak tetap setiap tahunnya, ada tahun dengan angka pengangguran yang tinggi. khususnya pada tahun 2020 sebesar 5,84 persen di Provinsi Jawa Timur, dapat memiliki dampak yang signifikan, terutama terkait dengan kemungkinan peningkatan tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan kesulitan dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi penduduk usia kerja, yang pada gilirannya dapat mengarah pada penurunan pendapatan rumah tangga yang berisiko terhadap penurunan Indeks Pembangunan Manusia melalui aspek Taraf Hidup penduduk.

Dalam konteks pembangunan manusia, besarnya jumlah kemiskinan merupakan salah satu primadona dan salah satu elemen utama dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Kemiskinan diakibatkan oleh ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan, yang mengakibatkan penurunan pada

daya beli pada masyarakat, dan hal tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan seperti Kesehatan dan Pendidikan yang mempengaruhi tumbuhnya Indeks Pembangunan Manusia. Menurut (Sulistyanto, 2010), kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang selalu dihadapi masyarakat. kemiskinan bukanlah masalah baru, melainkan telah menjadi tantangan sepanjang sejarah manusia. Meskipun sering kali dianggap sebagai fenomena yang sudah umum, dampak kemiskinan dapat sangat serius dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan bukan hanya tentang kurangnya pendapatan, tetapi juga tentang bagaimana kondisi ini memengaruhi kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mencakup sulitnya memenuhi kebutuhan pangan, perumahan yang layak, pendidikan yang baik, serta akses terhadap layanan kesehatan.

Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi minimum. Hal ini menyoroti eratnya hubungan antara kemiskinan dan kondisi perekonomian, dimana ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi merupakan salah satu indikator kemiskinan yang berdampak terhadap ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup tertentu. Dalam arti proper, memberikan pemahaman yang tepat tentang kemiskinan sebagai keadaan kekurangan uang dan barang yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup. kemiskinan dipahami sebagai ketidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Pernyataan tersebut menyebutkan beberapa kebutuhan dasar, antara lain pangan, sandang, papan, serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang memadai. Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat

menyebabkan penurunan kualitas hidup dan mempengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga.



Gambar 1. 5 Grafik Tingkat Kemiskinan Jawa Timur 2013-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Berdasarkan gambar 5 grafik tingkat kemiskinan yang diatas, dapat dijelaskan bahwa angka kemiskinan di wilayah yang diteliti mengalami fluktuasi dalam periode 2013 hingga 2022. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan berada di angka 12,73% dan sedikit meningkat pada tahun 2014 menjadi 12,78%. Selanjutnya, terjadi tren penurunan secara bertahap, di mana pada tahun 2015 angka kemiskinan menurun menjadi 12,34%, lalu pada 2016 menjadi 12,05%, dan terus turun hingga 11,77% pada 2017. Tren penurunan ini berlanjut hingga 2019, ketika tingkat kemiskinan mencapai titik terendah sebesar 10,37%. Namun, pada tahun 2020, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 11,09%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran. Pada tahun 2021, angka

kemiskinan kembali naik menjadi 11,40%, mencerminkan dampak pandemi yang masih terasa.

Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 10,38%, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pasca-pandemi. Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dan program bantuan sosial dari pemerintah kemungkinan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di tahun tersebut.

Jawa Timur menempati peringkat pertama dalam daftar provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia pada Maret 2024. Jawa Timur menempati peringkat ketiga sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Jawa Timur adalah 9,79%.

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2022 Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya mengalami penurunan hingga tahun 2019, namun meningkat pada tahun 2020 hingga tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Hal ini mencerminkan dampak signifikan pandemi ini terhadap kondisi perekonomian dan kesejahteraan sosial. Berbagai strategi dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah bagi pemerintah, namun juga masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan keterlibatan aktif berbagai aktor, termasuk sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.
2. Menganalisis Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.
4. Menganalisis Pengaruh Tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan difokuskan pada wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Data yang digunakan adalah data skunder yang mungkin memiliki batasan dalam hal akurasi dan kelengkapan.
3. Penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi IPM, seperti kebijakan pemerintah dan kondisi sosial budaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu lebih dalam untuk memahami permasalahan sesuai judul yang penulis teliti melalui uji analisis data dan agar dapat semakin mengembangkan pemahaman yang lebih baik terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, pengangguran dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan manusia secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pencapaian IPM di Jawa Timur, melalui inisiatif pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, atau dukungan untuk koperasi lokal.